

KEBIJAKAN FERTILITAS SEBAGAI INSTRUMEN KONTROL KEPENDUDUKAN NEGARA: PERSPEKTIF GEOGRAFI POLITIK ATAS BONUS DEMOGRAFI DAN KETIMPANGAN SPASIAL DI INDONESIA

Husna Amalia Zahra¹, Cynara Salsabila Fatoni², Ikhsan Maulana³, Melodia Ainun Nazibah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Geografi
Universitas Siliwangi

Email: 242170111102@student.unsil.ac.id

Artikel Info : diterima 21/05/2026, revisi 25/05/2026, publish 21/06/2026

ABSTRACT

Fertility policy is one of the tools used by the state to control population growth and support national development. This study aims to analyze fertility policy in Indonesia from a political geography perspective, particularly in relation to the demographic bonus and inequality between regions. The method used is a descriptive qualitative approach through literature review and documentation collection. The research findings indicate that fertility policy focuses not only on regulating birth rates but also on improving population quality and regional development. Currently, Indonesia is experiencing a demographic bonus phase that offers opportunities for economic growth through the dominance of the productive-age population. However, exploiting this opportunity still faces various challenges such as unemployment, educational inequality, and limited access to reproductive health services. Furthermore, there are differences in fertility rates across regions, with urban areas having lower fertility rates compared to peripheral areas such as Papua and East Nusa Tenggara. Therefore, a population policy that is equitable and appropriate to the characteristics of each region is needed to ensure that the demographic bonus can be managed most effectively and sustainably.

Keywords : *fertility, demographic bonus, political geography*

ABSTRAK

Kebijakan mengenai fertilitas menjadi salah satu alat bagi negara untuk mengontrol pertumbuhan populasi serta mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fertilitas di Indonesia dari sudut pandang Geografi Politik, khususnya berkaitan dengan bonus demografi dan ketidakmerataan antarwilayah. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fertilitas tidak hanya memusatkan perhatian pada pengaturan tingkat kelahiran, tetapi juga pada peningkatan kualitas penduduk dan pengembangan wilayah. Saat ini, Indonesia tengah berada dalam fase bonus demografi yang menawarkan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi melalui dominasi populasi usia produktif. Namun, pemanfaatan peluang ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pengangguran, ketidaksetaraan pendidikan, dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Selain itu, ada perbedaan tingkat fertilitas di berbagai wilayah, di mana kawasan perkotaan memiliki tingkat fertilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah perifer seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kependudukan yang adil dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah untuk memastikan bahwa bonus demografi dapat diolah secara paling efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Fertilitas, Bonus demografi, Geografi politik

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis demografi, tetapi juga mencerminkan bentuk intervensi negara terhadap tubuh, ruang, dan reproduksi masyarakatnya (Listyaningsih & Satiti, 2022). Dalam kajian Geografi Politik, pengelolaan penduduk menunjukkan bagaimana negara mengatur wilayah, mendistribusikan sumber daya, serta mempertahankan legitimasi kekuasaan. Negara bukan hanya mengendalikan jumlah penduduk, melainkan juga mengarahkan persebaran dan pertumbuhannya sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Di negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan fertilitas menjadi penting karena dipandang sebagai instrumen strategis dalam memanfaatkan bonus demografi, yaitu kondisi meningkatnya proporsi penduduk usia produktif yang hanya berlangsung dalam periode tertentu dan tidak secara otomatis menghasilkan kemajuan ekonomi (Melo et al., 2024).

Secara global, angka *Total Fertility Rate* (TFR) mengalami penurunan signifikan, dari hampir 5 anak per perempuan pada dekade 1960-an menjadi sekitar 2,2 pada tahun 2024 (Ritchie, H., & Rod s-Guirao, L., 2024)). Meskipun demikian, penurunan tersebut terjadi secara tidak merata. Negara-negara maju cenderung menghadapi persoalan penuaan penduduk dan berkurangnya tenaga kerja produktif, sedangkan sebagian negara berkembang masih memiliki TFR di atas 3. Perbedaan ini menimbulkan dinamika geopolitik baru yang berkaitan dengan migrasi, persaingan ekonomi, ketahanan sosial, hingga kebutuhan tenaga kerja produktif antarnegara (Cicik & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pengendalian fertilitas menjadi salah satu langkah penting bagi negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial (Nainggolan, 2024).

Indonesia saat ini berada pada fase transisi demografi yang cukup menentukan. TFR nasional telah mendekati angka penggantian penduduk, yaitu sekitar 2,11 pada tahun 2024 berdasarkan data BKKBN/PK-24, sementara penduduk usia kerja (15–64 tahun) mencapai sekitar 70% dari total populasi nasional (Yusuf et al., 2023). Situasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada masa bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar tahun 2030 (Aprianti et al., 2022). Kondisi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dominasi penduduk usia produktif dapat meningkatkan produktivitas nasional. Namun demikian, bonus demografi tidak secara otomatis memberikan manfaat apabila tidak disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan lapangan kerja yang memadai. (Purba et al., 2024).

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti tingginya pengangguran usia muda, ketimpangan kualitas pendidikan, kemiskinan, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi di sejumlah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan fertilitas tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian angka kelahiran, tetapi juga sebagai strategi negara dalam meningkatkan kualitas penduduk dan menjaga stabilitas pembangunan wilayah (Perintis et al., n.d.).

Aspek yang sering kurang mendapat perhatian adalah dimensi spasial dan politik dalam pengelolaan bonus demografi. Perbedaan TFR antarprovinsi di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar, misalnya DKI Jakarta yang telah berada di bawah angka penggantian penduduk, sedangkan wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua masih memiliki TFR di atas 2,5 (Windiany et al., 2024). Ketimpangan tersebut mencerminkan perbedaan kapasitas kelembagaan daerah, jangkauan kebijakan negara, serta akses masyarakat terhadap layanan kependudukan dan kesehatan reproduksi. Selain itu, faktor pendidikan, kondisi ekonomi, budaya lokal, dan tingkat urbanisasi juga turut memengaruhi variasi fertilitas antarwilayah (Nugrahaeni & Sugiharti, 2022).

Dalam konteks desentralisasi, keberhasilan program kependudukan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, ketimpangan fertilitas antarwilayah bukan hanya persoalan demografi, melainkan juga persoalan Geografi Politik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, hubungan pusat dan daerah, serta ketimpangan pembangunan wilayah. Daerah dengan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik umumnya mengalami transisi fertilitas lebih cepat dibandingkan wilayah perifer yang masih memiliki keterbatasan akses pelayanan publik. Akibatnya, bonus demografi di Indonesia menunjukkan pola yang berbeda-beda sesuai karakteristik wilayah masing-masing (Puri, 2019).

Selain itu, penelitian mengenai bonus demografi di Indonesia selama ini lebih banyak menyoroti aspek ekonomi dan kependudukan, sedangkan pendekatan Geografi Politik masih relatif terbatas digunakan. Pendekatan Geografi Politik dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bahwa pengelolaan bonus demografi tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola wilayah dan strategi pembangunan negara (Muh, et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fertilitas di Indonesia sebagai instrumen kontrol kependudukan negara. Fokus pembahasan meliputi: bagaimana negara merancang dan melaksanakan kebijakan fertilitas sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, bagaimana ketimpangan spasial antarwilayah menjadi tantangan dalam pemanfaatan bonus demografi, serta implikasi geografi politik dari disparitas demografis terhadap tata kelola wilayah dan pembangunan nasional (Yuwono, 2024).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode *deskriptif-analitis* melalui strategi studi kasus tunggal pada Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan menafsirkan kebijakan fertilitas sebagai instrumen kontrol kependudukan dalam perspektif Geografi Politik, bukan semata-mata mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Strategi studi kasus digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu (Sari & Asmendri, 2020). Indonesia dipilih sebagai studi kasus karena sedang berada pada fase bonus demografi dengan karakteristik ketimpangan spasial dan kependudukan yang kompleks, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks hubungan antara negara, ruang, dan pembangunan wilayah (Adryawning & Widiyanto, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian memanfaatkan *data sekunder kuantitatif* untuk menggambarkan kondisi demografis nasional serta variasi spasial antarprovinsi. Data yang digunakan mencakup indikator *Total Fertility Rate* (TFR), pertumbuhan penduduk, struktur umur penduduk, dan rasio ketergantungan (Mahendra, 2019).

Selain menggunakan data statistik, penelitian juga melakukan *analisis dokumen kebijakan* terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, RPJMN 2020–2024, Dokumen Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK), serta laporan strategis BKKBN dan Bappenas. Analisis dokumen dilakukan dengan mengidentifikasi narasi, tujuan kebijakan, dan strategi negara dalam pengendalian kependudukan. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana negara membingkai kebijakan fertilitas sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, pengelolaan populasi, dan tata kelola teritorial (Opan Fauzan Hamdan, 2019).

Integrasi data dilakukan melalui teknik *triangulasi* dengan membandingkan tren demografis kuantitatif dan substansi kebijakan pemerintah untuk melihat kesesuaian, kesenjangan, maupun kontradiksi antara kondisi demografis dan implementasi kebijakan kependudukan. Analisis spasial dilakukan melalui perbandingan indikator demografis antarprovinsi guna melihat pola ketimpangan wilayah di Indonesia. Data kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema kebijakan, interpretasi spasial, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Validitas data diperkuat melalui perbandingan lintas sumber statistik dan dokumen kebijakan pemerintah (Hidayat, 2013).

Pendekatan tersebut memandang kebijakan kependudukan sebagai bentuk upaya negara dalam mengelola populasi sekaligus mengatur ruang wilayah secara bersamaan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang belum sepenuhnya tersedia secara rinci pada tingkat subnasional, serta keterbatasan dalam menjelaskan hubungan kausal secara langsung antara kebijakan fertilitas dan keberhasilan pemanfaatan bonus demografi (Melo et al., 2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Negara sebagai Pengendali Fertilitas: Instrumen dan Sejarah Kebijakan

Dalam perspektif Geografi Politik, kebijakan fertilitas merupakan salah satu bentuk paling nyata dari kekuasaan negara terhadap tubuh, ruang, dan reproduksi masyarakat, atau yang disebut sebagai *biopolitics* (Nurhayati, 2016). Negara tidak hanya mengatur jumlah penduduk, tetapi juga mengendalikan bagaimana populasi didistribusikan, diarahkan, dan dijadikan bagian dari strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan fertilitas tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai instrumen politik negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan teritorial.

Di Indonesia, peran negara dalam pengendalian fertilitas telah berlangsung selama lebih dari lima dekade melalui berbagai institusi, regulasi, dan program kependudukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970, menjadi instrumen utama negara dalam menekan angka kelahiran. Pada masa Orde Baru, Program Keluarga Berencana (KB) dijalankan secara sentralistik dan bersifat direktif melalui kampanye nasional “dua anak cukup”, distribusi alat kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan reproduksi yang dikendalikan pemerintah pusat (Puri, 2019).

Kebijakan tersebut berhasil menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) Indonesia dari sekitar 5 anak per perempuan pada dekade 1970-an menjadi mendekati angka penggantian atau *replacement level* sekitar 2,1 pada tahun 2024 (Listyaningsih & Satiti, 2022). Namun, keberhasilan tersebut juga menunjukkan kuatnya intervensi negara terhadap kehidupan reproduksi masyarakat. Dalam perspektif biopolitik, pengendalian fertilitas bukan hanya bertujuan menekan pertumbuhan penduduk, tetapi juga membentuk perilaku sosial masyarakat sesuai dengan agenda pembangunan negara. Dengan kata lain, tubuh dan reproduksi masyarakat menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan populasi yang diarahkan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional (Rahardja & , Robani Caturseptani, 2021).

Pascareformasi, pendekatan kebijakan fertilitas mengalami perubahan seiring dengan penerapan desentralisasi dan meningkatnya perhatian terhadap hak reproduksi masyarakat. Pendekatan negara bergeser dari pola komando menuju pendekatan yang lebih berbasis advokasi, pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 kemudian mereposisi isu kependudukan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengaturan persebaran penduduk. Dalam Dokumen Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2024–2029, kebijakan kependudukan bahkan secara eksplisit ditempatkan sebagai instrumen pembangunan wilayah dan penguatan daya saing nasional.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi hanya berfokus pada pengurangan angka kelahiran, tetapi juga pada pengelolaan distribusi spasial penduduk sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Dalam konteks ini, fertilitas, struktur umur penduduk, dan bonus demografi diposisikan sebagai variabel strategis dalam perencanaan ekonomi, fiskal, dan pembangunan territorial (Fatoni et al., 2015).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan fertilitas di era desentralisasi tidak berlangsung secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Kapasitas pemerintah daerah, kondisi sosial budaya, tingkat pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan reproduksi menyebabkan keberhasilan program pengendalian fertilitas berbeda antarwilayah. Wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta mengalami penurunan fertilitas lebih cepat dibandingkan beberapa wilayah perifer di Indonesia timur yang masih memiliki TFR relatif tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan negara sangat dipengaruhi oleh ketimpangan spasial dan kapasitas tata kelola wilayah.

2. Bonus Demografi sebagai Proyek Politik: Antara Target Nasional dan Realitas Spasial.

Bonus demografi kondisi ketika proporsi penduduk usia kerja jauh melampaui kelompok nonproduktif telah diposisikan oleh negara sebagai peluang strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Struktur usia Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan sekitar 70,72% penduduk berada pada kelompok usia 15–64 tahun dengan rasio ketergantungan yang relatif rendah (Mahendra, 2019). Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada fase puncak bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga sekitar tahun 2030. Oleh karena itu, bonus demografi menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercermin dalam RPJMN 2020-2024 maupun visi “Indonesia Emas 2045” (Melo et al., 2024).

Namun demikian, bonus demografi bukanlah fenomena yang secara otomatis menghasilkan keuntungan ekonomi. (Kependudukan, n.d.). Menjelaskan bahwa keuntungan demografis hanya dapat tercapai apabila diiringi investasi yang memadai dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja produktif. Sebaliknya, kegagalan dalam memanfaatkan bonus demografi dapat memunculkan kondisi *youth bulge trap*, yaitu peningkatan jumlah penduduk usia muda yang tidak terserap dalam pasar kerja sehingga berpotensi menimbulkan pengangguran, ketimpangan sosial, dan ketegangan politik (Pravitasari, 2025).

Dalam perspektif Geografi Politik, bonus demografi tidak dapat dipahami hanya sebagai angka nasional, melainkan sebagai fenomena yang terdistribusi secara spasial dan dipengaruhi oleh kapasitas negara di tingkat lokal. Ketika pemerintah pusat menetapkan target *Total Fertility Rate* (TFR) nasional sebesar 2,1, negara pada dasarnya sedang merancang proyeksi demografis di atas wilayah-wilayah dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda. Wilayah perkotaan di Pulau Jawa, misalnya, cenderung memiliki akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang lebih baik dibandingkan beberapa wilayah perifer di Indonesia timur. Akibatnya, kemampuan masing-masing daerah dalam memanfaatkan bonus demografi juga menjadi tidak merata.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut turut mendorong arus migrasi dan urbanisasi menuju kota-kota besar yang dianggap memiliki peluang ekonomi lebih baik. Kondisi ini menyebabkan konsentrasi tenaga kerja produktif lebih terpusat di wilayah tertentu, sementara daerah lain tetap menghadapi keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan rendahnya kapasitas pembangunan. Dengan demikian, bonus demografi bukan hanya persoalan jumlah penduduk usia produktif, tetapi juga berkaitan dengan distribusi pembangunan, mobilitas penduduk, dan kapasitas negara dalam mengelola ketimpangan wilayah.

3. Ketimpangan Spasial Demografis dan Implikasi Geografi Politiknya

Disparitas demografis antarprovinsi di Indonesia merupakan salah satu tantangan paling krusial dalam tata kelola kependudukan. Data terbaru menunjukkan bahwa sementara DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sudah berada di bawah angka penggantian (TFR <2,1), provinsi-provinsi di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua masih mencatat TFR di atas 2,5 bahkan kawasan timur Indonesia secara umum mencapai 2,49 (Kemendukbangga, 2025). Kesenjangan ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan ketidaksetaraan struktural dalam akses layanan kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan perempuan, dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Ketimpangan spasial demografis ini memiliki implikasi berlapis dalam perspektif Geografi Politik. Pertama, dari sudut pandang relasi pusat–daerah, disparitas TFR menunjukkan bahwa jangkauan kebijakan kependudukan nasional tidak merata secara teritorial. Desentralisasi pascareformasi telah mengalihkan sebagian tanggung jawab program KB ke pemerintah daerah, namun tanpa disertai kapasitas fiskal dan kelembagaan yang memadai di daerah tertinggal (Mahendra, 2019). Akibatnya, terjadi *implementation gap* antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan.

Kedua, ketimpangan distribusi penduduk usia kerja yang terkonsentrasi di Jawa menciptakan ketegangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Program transmigrasi historis mencerminkan upaya negara mengelola distribusi spasial penduduk secara aktif, namun hasilnya tetap tidak berhasil mengubah pola konsentrasi yang ada secara fundamental (Prameswari, 2024).

Ketiga, provinsi-provinsi dengan TFR tinggi dan kapasitas ekonomi rendah berisiko menghadapi demographic stress: pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja lokal yang memadai. Kondisi ini berpotensi mendorong migrasi tidak terencana ke pusat-pusat urban, memperparah tekanan urbanisasi di Jawa, dan memunculkan ketegangan sosial-teritorial yang berdimensi politik.

Instrumen seperti Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) merupakan respons negara terhadap tantangan ini, dengan menyediakan kerangka 30 indikator yang dapat diadaptasi sesuai konteks daerah. Namun, efektivitasnya masih terbatas pada provinsi-provinsi yang memiliki kapasitas administrasi dan komitmen politik yang kuat (BKKBN, 2025). Ini kembali menegaskan bahwa kebijakan fertilitas di Indonesia pada dasarnya adalah juga merupakan upaya negara untuk mengelola ruang demografis secara bersamaan dengan ruang fisik dan ekonomi.

D. KESIMPULAN

Kebijakan mengenai fertilitas di Indonesia merupakan salah satu alat penting bagi pemerintah untuk mengatur jumlah penduduk dan mendukung pembangunan negara. Dalam studi Geografi Politik, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengendalian angka kelahiran, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan kualitas masyarakat, distribusi penduduk, dan pengembangan regional. Saat ini, Indonesia berada dalam fase bonus demografi yang ditandai dengan banyaknya penduduk dalam usia kerja. Situasi ini memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh mutu pendidikan, layanan kesehatan yang baik, dan tersedianya lapangan kerja yang cukup. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi dapat menghasilkan berbagai masalah sosial dan ekonomi.

Penelitian juga mengungkapkan adanya ketidakmerataan fertilitas antar daerah di Indonesia. Wilayah perkotaan umumnya memiliki angka fertilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan kemampuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah agar pemanfaatan bonus demografi dapat terjadi secara merata dan berkelanjutan.

E. SARAN

1. Pemerintah harus meningkatkan distribusi pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja agar kesempatan bonus demografi bisa dimanfaatkan secara optimal di seluruh daerah Indonesia.
2. Pelaksanaan program pengendalian kelahiran dan layanan kesehatan reproduksi harus ditingkatkan, terutama di wilayah yang masih memiliki angka kelahiran tinggi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.
3. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar kebijakan populasi dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan situasi dan keperluan setiap daerah.
4. Usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dengan cara meningkatkan pendidikan, kemampuan kerja, dan produktivitas orang-orang yang berada dalam usia kerja.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyelidiki dengan lebih mendalam hubungan antara kebijakan kesuburan, ketimpangan antar wilayah, dan pemanfaatan bonus demografi di tingkat regional serta lokal.

F. DAFTAR RUJUKAN

- Adryawning, V. A., & Widiyanto, D. (2025). Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 210. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.86894>
- Aprianti, D. I., Suyanto, S., & Choirudin, S. (2022). Tantangan Bonus Demografi Bagi Pemerintah. *Nusantara Innovation Journal*, 1(1), 10–18. <https://doi.org/10.70260/nij.v1i1.12>
- BKKBN. (2025). *DESAIN BESAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (DBPK) 2024-2025*. <https://id.scribd.com/document/906525856/Desain-Besar-Pembangunan-Kependudukan>
- Cicih, L. H. M., & Nugroho, D. N. A. (2021). Kondisi Lanjut Usia Di Indonesia Era Bonus Demografi. *Sosio Informa*, 7(2), 158–171. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2681>
- Fatoni, Z., Astuti, Y., Seftiani, S., Situmorang, A., Widayatun, & Purwaningsih, S. S. (2015). Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 65–74.
- Hidayat, N. (2013). Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1(2), 24–36. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/2493>

- Kabul, L. M., Darenoh, J. N., & Subhani, A. (2020). Pengembangan Model dan Metode Perhitungan Bonus Demografi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 4(2), 138–147. <https://doi.org/10.29408/geodika.v4i2.2664>
- Listyaningsih, U., & Satiti, S. (2022). Dinamika fertilitas dan prevalensi kontrasepsi di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 153. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.595>
- Mahendra, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 223–242. <https://doi.org/10.54367/jrak.v3i2.448>
- Melo, R. H., Lasulika, C. T., & Saleh, S. E. (2024). Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Kebijakan Kependudukan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 3(2), 143–148.
- Nainggolan, F. A. (2024). Analisis Potensi dan Resiko Bonus Demografi terhadap Pertumbuhan. *Jurnal UPI*, 6(2), 95–104.
- Nugrahaeni, S. R., & Sugiharti, L. (2022). Pengaruh faktor demografi dan nondemografi terhadap fertilitas di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 17(1), 15. <https://doi.org/10.14203/jki.v17i1.679>
- Nurhayati, S. S. A. dan S. (2016). DETERMINAN FERTILITAS DI INDONESIA. *Jurnal Kependudukan Indonesia* |, 11(Juni), 1–14.
- Opan Fauzan Hamdan. (2019). Rasio Tenaga Pendidik, Rasio Tenaga Kesehatan, Dan Capaian Pembangunan Manusia Di Indonesia Dalam Analisis Spasial. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(2), 155–172.
- Perintis, J., Km, K., Selatan, S., Gizi, D. I., Masyarakat, F. K., Hasanuddin, U., Perintis, J., Km, K., Selatan, S., Gizi, D. I., Masyarakat, F. K., Hasanuddin, U., Perintis, J., Km, K., & Selatan, S. (n.d.). *FENOMENA FERTILITAS DI INDONESIA : DULU , KINI , DAN NANTI*. 257–279.
- Prameswari, L. B. (2024). *BKKBN: Peningkatan layanan reproduksi solusi atasi disparitas TFR*. <https://www.antaranews.com/berita/4028397/bkkbn-peningkatan-layanan-reproduksi-solusi-atasi-disparitas-tfr#:~:text=Meski begitu%2C Ukik tetap mengapresiasi,target 2%2C19 dapat tercapai 2%2C14>
- Pravitasari, A. P. (2025). *Memperkuat kebijakan kependudukan yang berpusat pada manusia*. <https://www.antaranews.com/berita/4999929/memperkuat-kebijakan-kependudukan-yang-berpusat-pada-manusia?page=all#:~:text=TFR dan parameter demografis lainnya,reproduksi%2C masa depan%2C dan keluarganya>
- Purba, S. S., Wasir, R., & Rahmadanti, M. D. (2024). Literature Review: Bonus Demografi Dan Sistem Kesehatan: Bagaimana Mengoptimalkan Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, 2(3), 148–157. <https://doi.org/10.59841/jumkes.v2i3.1325>
- Puri, K. (2019). *KELEMBAGAAN DAN CAPAIAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB): DARI ERA SENTRALISASI KE DESENTRALISASI*. 14(1).
- Rahardja, M. B., & , Robani Caturseptani, R. (2021). Komposisi jenis kelamin anak, program Keluarga Berencana dan fertilitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>

- Ritchie, H., & Rod  s-Guirao, L. (2024). *Peak global population and other key findings from the 2024 UN World Population Prospects*. Our World in Data.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Windiany, E., Rahel, T. L., & Sugihanawati, A. (2024). Faktor-faktor yang berhubungan dengan stagnasi penurunan total fertility rate (TFR) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data SDKI tahun 2017. *Media Ilmu Kesehatan*, 13(2), 181–192. <https://ejournal.unjaya.ac.id/index.php/mik>
- Yusuf, M., Poetiray, G., Purnomo, D., & Utomo, A. W. (2023). Peluang dan tantangan pemanfaatan bonus demografi pada aspek ketenagakerjaan di Kota Salatiga. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 18(1), 2023. <https://doi.org/10.55981/jki.2023.1387>
- Yuwono, P. (2022). Bonus demografi dan pembangunan industri di Provinsi Papua. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 71-81.